# POB EVALUASI KURIKULUM

	NO POB	AKA/AP-FIP-UM/019/2017				
& NEGA	Tanggal Pembuatan	4 Januari 2017				
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	Tanggal Revisi	6 Pebruari 2017				
THE CONTRACTOR	Tanggal Efektif	7 Pebruari 2017				
		Ketua Jurusan AP,				
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI	Pengesahan					
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)		Dr. Mustiningsih, M.Pd				
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN JURUSAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN	Judul POB	Prosedur Operasional Baku Evaluasi Kurikulum				
	Kualifikasi Pelaksana					
<b>Dasar Hukum</b> (halaman 75)	Kemampuan dan Keterampilan Pelaksana  • Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer					
	Bertanggung jawab terhadap penyelesaian pekerjaan dengan cepat dan cermat					
Batas Waktu: 1 tahun	Peralatan dan Perlengkapan Komputer dan Alat Tulis Kantor					

### I. Dasar Hukum dan Tujuan Evaluasi Kurikulum

#### A. Dasar Hukum

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil.
- 8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 96 tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
- 9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Standar Pendidikan Nasional.
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Sertifikat Pendidik Untuk Dosen.
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 68 Tahun 2009 Tentang Pedoman Akreditasi Berkala Ilmiah.
- 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimum Bagi Perguruan Tinggi Negeri yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
- 13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimum Bagi Perguruan Tinggi Negeri yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
- 14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu.
- 15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 73 Tahun 2009 tentang Perangkat Akreditasi Program Studi Sarjana.
- 16. Peraturan Menteri Pendidikan Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang.
- 17. Peraturan Menteri Pendidikan Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang.

- 18. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
- 19. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 004/U/2002 tentang Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi.
- 20. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 297/KMU.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
- 21. Peraturan Rektor UM Nomor 8 Tahun 2013 tentang Suplemen Pedoman Pendidikan Universitas Negeri Malang tahun 2013.
- 22. Keputusan Rektor UM Nomor 8 tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Negeri Malang.

### B. Tujuan

- 1. Memberikan acuan bagi pimpinan jurusan dan semua yang terkait dalam penyelenggaraan pendidikan dan layanan administrasi.
- 2. Sebagai pedoman prosedur penyusunan katalog jurusan agar sesuai dengan pedoman pendidikan di lingkungan Universitas Negeri Malang.
- 3. Mengatur penyusunan Rencana Perkuliahan Semester (RPS), dimana RPS: (1) bagi dosen merupakan pegangan untuk melaksanakan dan mengembangkan perkuliahan dan (2) bagi mahasiswa sebagai panduan untuk mengikuti kuliah dan melaksanakan aktivitas belajar dari matakuliah yang diprogram dalam semester yang bersangkutan.
- 4. Membantu dosen dan mahasiswa agar pelaksanaan proses perkuliahan dapat berjalan dengan lancar dan tertib.
- 5. Sebagai pedoman pelaksanaan perkuliahan pengganti agar target perkuliahan dalam satu semester sesuai dengan buku Pedoman Pendidikan UM.
- 6. Pedoman ini dimaksudkan agar kurikulum yang diimplementasikan sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan kebutuhan masyarakat (stakeholder).
- 7. Sebagai prosedur operasional baku penggunaan ruang laboratorium di lingkungan Jurusan AP FIP UM oleh dosen dan mahasiswa untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

# II. Bagan Alur POB Evaluasi Kurikulum

		Pelaksana			Mutu Baku			
No	Kegiatan	Kajur	SATGAS	TIM PERUMUS	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Menginisiasi pengembangan kurikulum dan membentuk satuan tugas pengembangan Kurikulum				Draft Satgas	1 hari	pembentukan satgas	
2	Mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kurikulum melalui survey kelebihan dan kelemahan kurikulum				Draft kurikulum	1 hari	analisis kebutuhan	
3	Menyusun draft pengembangan kurikulum berbasis survey				Draft kurikulum	1 minggu	draft kurikulum	
4	Meminta masukan berbagai pihak atas draft pengembangan kurikulum berbasis survey				Draft kurikulum	2 hari	rekomendasi mengenai kurikulum	
5	Mereviu draft kurikulum jurusan				Draft kurikulum	1 minggu	hasil review	
6	Merangkum masukan draft kurikulum jurusan untuk dibahas dalam forum semiloka pengembangan kurikulum	<u></u>			Draft kurikulum	1 hari	rangkuman	
7	Membentuk tim perumus untuk finalisas kurikulum jurusan				Tim perumus	1 hari	tim perumus kurikulum	
8	Merumuskan naskah final kurikulum jurusan untuk direkomendasikan ke jurus	an			Naskah kurikulum	1 minggu	naskah kurikulum	
9	Menetapkan naskah final kurikulum Jurusan				Naskah kurikulum	1 hari	naskah kurikulum jadi	
10	Mengirim dokumen kurikulum jurusan ke Dekan/Wakil Dekan I /Wakil Rektor I				Naskah kurikulum	1 hari	dokumen terkirim	